

Analisis Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kawasan Konservasi Perairan di Bagian Timur Indonesia

Analysis of Inclusive Economic Growth Index in Marine Conservation Areas of Eastern Indonesia

Oleh:

Iqbal S. Gultom^{1*}, T. Danny Anggoro¹, A.S. Kenyo Handadari¹, Priagung Wicaksono¹,
R.B. Adhitya Nugraha¹

¹Direktorat Jasa Kelautan, Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

*email: iqbal.gultom@kkp.go.id

Received: November 14, 2022; Revised: December 27, 2022; Accepted: February 27, 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada 30 kabupaten/kota di 9 provinsi di wilayah timur Indonesia yang beririsan dengan kawasan konservasi perairan. IPEI menunjukkan 1 (satu) daerah yang mengalami tren menurun pada periode 2019-2021 yaitu Sorong Selatan, 25 daerah yang mengalami tren menurun pada periode 2019-2020 dan 4 kabupaten/kota yang konsisten mengalami kenaikan pada periode 2019-2021. Posisi relatif IPEI 18 daerah menunjukkan masih berada di bawah rata-rata nasional IPEI 2021. Raja Ampat dan Sorong Selatan merupakan daerah yang masuk kategori “Tidak Memuaskan” berdasarkan IPEI 2021. Prioritas 5 (lima) daerah adalah Sorong Selatan, Raja Ampat, Kepulauan Aru, Kaimana, dan Seram Bagian Barat. Prioritas intervensi dilakukan pada Dimensi Akses dan Kesempatan, kecuali pada Kaimana yang memiliki prioritas Dimensi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi untuk diintervensi.

Kata kunci: Inklusif, Pertumbuhan, Kawasan, Konservasi, Perairan

ABSTRACT

This research analyzes the Inclusive Economic Growth Index (IPEI) in 30 regencies/cities in 9 provinces in eastern Indonesia adjacent to marine conservation areas. IPEI shows one location that experienced a downward trend in the 2019-2021 period, namely South Sorong, 25 regions that experienced a downward trend in the 2019-2020 period and four districts/cities that consistently experienced an increase in the 2019-2021 period. The relative position of IPEI 18 regions shows that they are still below the national average of IPEI 2021. Raja Ampat and South Sorong are regions that fall into the "Unsatisfactory" category based on IPEI 2021. Priority five regions are Sorong Selatan, Raja Ampat, Kepulauan Aru, Kaimana, and Seram Bagian Barat. The focus of intervention is on the Dimensions of Access and Opportunity, except for Kaimana, which focuses on the Dimensions of Economic Growth and Development for intervention.

Keywords: Inclusive, Growth, Marine, Protected, Area

PENDAHULUAN

Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara

berkelanjutan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi). Indonesia memiliki target penetapan kawasan konservasi perairan sebesar 32,50 juta hektar (10% dari luas perairan Negara

Kesatuan Republik Indonesia). Saat ini telah dibentuk kawasan konservasi perairan seluas 28,4 juta hektar (KKP, 2022), yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan ekosistem dengan berbagai pembatasan aktivitas pemanfaatan di dalamnya. Kawasan tersebut dikelola langsung oleh unit khusus pemerintah atau pemerintah daerah melalui satuan kerja Unit Pelaksana Teknis. Kawasan konservasi perairan di bagian timur Indonesia dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis KKP melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Wakatobi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Daftar kabupaten/kota disajikan pada Tabel 1.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan merupakan pengelolaan sumber daya. Salah satu prinsip *The Convention on Biological Diversity* menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan tanah, air dan sumber daya adalah pilihan masyarakat, sehingga keberhasilan tujuan pengelolaan kawasan konservasi untuk mencegah degradasi lingkungan bergantung pada pilihan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan (Zainol, Ramli & Amin, 2011). Shiferaw dan Bantilan (2004) menemukan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi aktor sekaligus korban kerusakan lingkungan, sehingga pengentasan kemiskinan memiliki korelasi positif dengan tujuan kawasan konservasi perairan.

Ketimpangan dan kemiskinan telah menjadi perhatian global sejak pertengahan tahun 1980an. Beberapa penyebab ketimpangan adalah eksploitasi sumber daya, diskriminasi dan monopoli kekuasaan (akses sumber daya) yang seluruhnya dipengaruhi oleh institusi dan keputusan politik seperti sistem pajak, hubungan industri, dan pasar tenaga kerja (Jacobs dan Mazzucato, 2016).

Tabel 1.

Daftar Nama Kabupaten dan Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi Perairan di Bagian Timur Wilayah Indonesia

No	Provinsi	Kawasan Konservasi Perairan		Kota/Kabupaten
1	Gorontalo	KKD Gorontalo	Teluk	Bone Bolango
				Gorontalo
				Kota Gorontalo
				Pahuwoto
2	Maluku	SAP Kepulauan Aru KKN TWP Laut Banda, KKN SAP Aru Tenggara dan KKD Pulau Kei Kecil		Kepulauan Aru
				Maluku Tengah
				Maluku Tenggara
				Seram Bagian Barat
3	Maluku Utara	KKD Mare	Pulau	Morotai
4	Nusa Tenggara Timur	KKD Pantar dan Laut Sawu	Selat TNP	Alor
				Kota Kupang
				Kupang
				Lembata
				Rote Ndao
5	Papua	KKN Padaido	TWP	Sabu Raijua
6	Papua Barat	KKN Kepulauan Raja Ampat, KKN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan KKD Kepulauan Raja Ampat		Biak Numfor
				Kaimana
				Raja Ampat
7	Sulawesi Selatan	TWP Kapoposang		Sorong Selatan
				Teluk Bintuni
8	Sulawesi Tengah	KKD Dalaka	Banggai	Pangkajene Dan Kepulauan
				Banggai
9	Sulawesi Tenggara	KKD Moramo	Teluk	Banggai Kepulauan
				Buton
				Kolaka Utara
				Konawe Selatan
				Konawe Utara
				Kota Kendari
				Muna
				Wakatobi

Sumber: KKP, 2021

Keterangan:

KKD : Kawasan Konservasi Daerah

SAP : Suaka Alam Perairan

TWP : Taman Wisata Perairan

KKN : Kawasan Konservasi Nasional

Pemerintah memiliki peran untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan dengan bentuk pembangunan yang inklusif. Rauniyar and Kanbur (2010) menyebutkan bahwa pembangunan yang inklusif bersifat meningkatkan kesejahteraan bersama sekaligus meningkatkan rata-rata pencapaian pembangunan. Benner dan Pastor (2016) menyebutkan definisi ekonomi inklusif sebagai upaya memperluas peluang untuk kemakmuran bersama, terutama bagi pihak yang menghadapi hambatan terbesar untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya ekonomi inklusif memiliki 5 (lima) ciri utama yaitu keadilan, partisipatif, tumbuh, berkelanjutan dan stabil. Ciri tersebut dapat diidentifikasi pada suatu wilayah melalui indikator pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, infrastruktur ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kemampuan

manusia, dan perlindungan sosial yang selanjutnya dapat dihitung komposit menjadi Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (McKinley, 2010). Bappenas (2019) menggambarkan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IPEI mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Bappenas telah menyusun IPEI untuk mengukur keberhasilan pembangunan inklusif yang diukur dengan angka indeks yang terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif yang dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Pilar Keberhasilan Pembangunan Inklusif

Pilar	Dimensi	Subpilar	Indikator
1	Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1.1. Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) riil per kapita,
			2. Share Manufaktur Terhadap PDRB,
			3. Rasio Kredit Perbankan Terhadap PDRB
		1.2. Kesempatan Kerja	1. Tingkat Kesempatan Kerja
			2. Persentase Penduduk Bekerja Penuh
			3. Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas
		1.3. Infrastruktur Ekonomi	1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
			2. Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam
			3. Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang
2	Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	2.1. Ketimpangan	1. Rasio Pendapatan Gini
			2. Sumbangan Pendapatan Perempuan
			3. Rasio Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota
		2.2. Kemiskinan	1. Persentase Penduduk Miskin
3	Perluasan Akses dan Kesempatan dengan Sub Pilar	3.1. Kapabilitas Manusia	2. Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari
			1. Angka Harapan Lama Sekolah
			2. Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
		3.2. Infrastruktur Dasar	3. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
			1. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak
			2. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri
		3.3. Keuangan Inklusif	1. Rasio Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga terhadap Penduduk Usia Produktif
			2. Rasio Kredit Perbankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sumber: Bappenas, 2019

Intervensi pemerintah yang menghasilkan kebijakan publik diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan Publik adalah suatu tindakan pemerintah untuk menetapkan sesuatu yang dapat atau tidak dapat dilakukan tentang masalah atau isu yang dihadapi publik (Kraft dan Furlong, 2018). Kebijakan publik dapat memiliki banyak bentuk implementasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk kebijakan publik diantaranya belanja pemerintah untuk kepentingan umum seperti bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, subsidi, pengembangan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Pengeluaran pemerintah tidak berorientasi menghasilkan profit seperti halnya sektor swasta dan dikendalikan oleh kepentingan politik sehingga sering kali tidak dibelanjakan untuk hal yang produktif (Stiglitz dan Rosengard, 2015). Idealnya kebijakan publik tidak hanya dikendalikan oleh mandat politik saja namun juga dilandaskan pada bukti-bukti ilmiah (Sucha dan Sienkiewicz, 2020).

Kebijakan publik dapat berbentuk program pemerintah berupa bantuan pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dijelaskan bahwa bantuan pemerintah diartikan sebagai bantuan yang tidak memiliki kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Bantuan pemerintah dapat berupa uang, jasa pelatihan, beasiswa atau barang untuk mendukung usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan pemerintah adalah bentuk intervensi untuk mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat. Pada kondisi keterbatasan anggaran, pemerintah perlu menetapkan prioritas wilayah yang akan diberikan bantuan pemerintah. Indeks Pertumbuhan Inklusif pada satuan

kabupaten/kota pada 9 (sembilan) provinsi dapat menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan prioritas dan memilih bentuk program pemerintah di sekitar kawasan konservasi perairan.

METODE PENELITIAN

Seluruh data yang digunakan adalah data sekunder yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan sumber resmi lain yang bersifat terbuka untuk umum. Data-data tersebut selanjutnya dijabarkan dalam statistik deskriptif bentuk tabulasi dan grafik serta dinarasikan secara kualitatif. Menurut Yusuf (2014) studi kualitatif digunakan dengan tujuan melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau objek dalam konteksnya serta menemukan makna yang mendalam tentang masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam keadaan alami.

Data Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari publikasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif terhadap:

1. Tren IPEI dan pilar penyusunannya selama 3 tahun terakhir untuk menentukan mengidentifikasi lokasi yang mengalami pertumbuhan/ kemunduran ekonomi; dan
2. Urutan IPEI 2021 dan pilar penyusunannya untuk menetapkan prioritas wilayah yang perlu diberikan bantuan pemerintah

HASIL DAN PEMBAHASAN

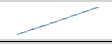
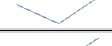
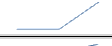
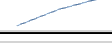
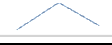
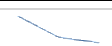
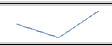
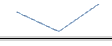
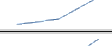
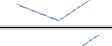
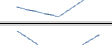
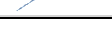
Data Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) menunjukkan terdapat 1 (satu) kabupaten/kota yang mengalami tren penurunan IPEI tahun 2019 – 2021 yaitu Sorong Selatan. Sebanyak 25 kabupaten/kota yang beririsan dengan kawasan konservasi

perairan mengalami penurunan IPEI dari tahun 2019 hingga 2020 yang diduga terjadi akibat bencana pandemi COVID-19 dan meningkat kembali pada tahun 2021. Terdapat kabupaten/kota yang konsisten

mengalami kenaikan IPEI pada periode 2019-2021 yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 3.

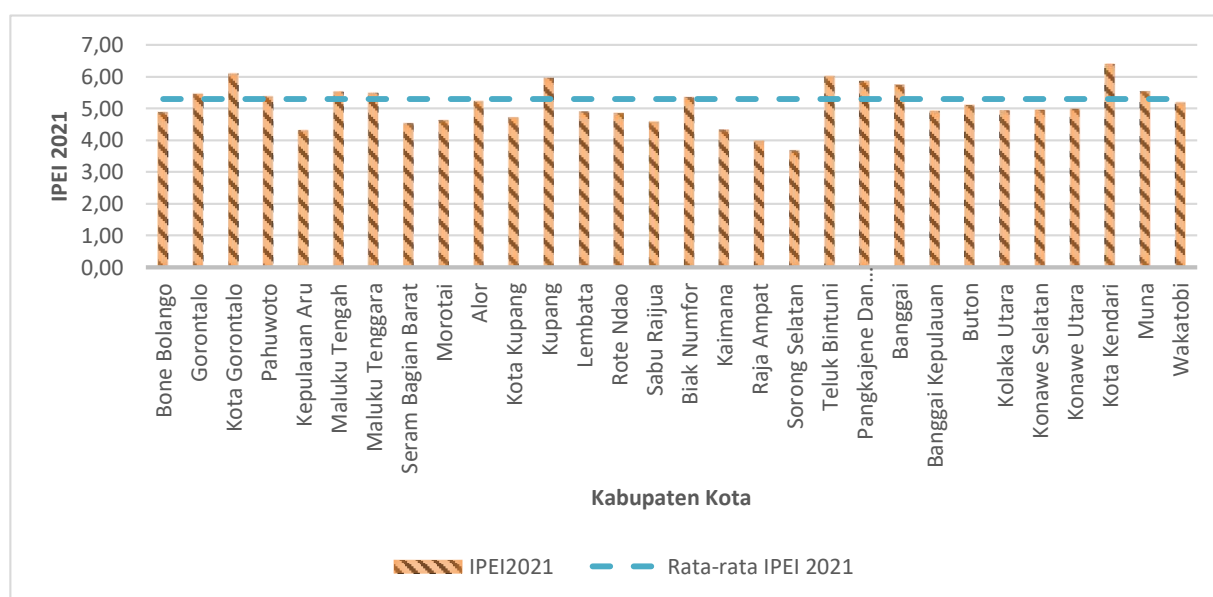
Analisis Tren Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten/Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021

No	Kota/Kabupaten	IPEI				Kategori IPEI 2021
		2019	2020	2021	Tren	
1.	Bone Bolango	4,93	4,85	4,88		Memuaskan
2.	Gorontalo	5,43	5,44	5,45		Memuaskan
3.	Kota Gorontalo	6,04	6,00	6,10		Memuaskan
4.	Pahuwoto	5,25	5,17	5,38		Memuaskan
5.	Kepulauan Aru	4,28	4,18	4,32		Memuaskan
6.	Maluku Tengah	5,43	5,26	5,52		Memuaskan
7.	Maluku Tenggara	5,54	5,44	5,49		Memuaskan
8.	Seram Bagian Barat	4,57	4,62	4,53		Memuaskan
9.	Morotai	4,51	4,50	4,63		Memuaskan
10.	Alor	4,93	4,93	5,22		Memuaskan
11.	Kota Kupang	4,70	4,61	4,71		Memuaskan
12.	Kupang	6,06	5,85	5,96		Memuaskan
13.	Lembata	4,91	4,78	4,91		Memuaskan
14.	Rote Ndao	4,60	4,61	4,86		Memuaskan
15.	Sabu Raijua	4,42	4,39	4,59		Memuaskan
16.	Biak Numfor	5,16	5,16	5,35		Memuaskan
17.	Kaimana	3,81	4,11	4,33		Memuaskan
18.	Raja Ampat	3,97	4,05	3,98		Tidak Memuaskan
19.	Sorong Selatan	3,91	3,71	3,67		Tidak Memuaskan
20.	Teluk Bintuni	5,88	5,88	6,01		Memuaskan
21.	Pangkajene Dan Kepulauan	5,89	5,65	5,86		Memuaskan
22.	Banggai	5,64	5,53	5,75		Memuaskan
23.	Banggai Kepulauan	4,69	4,66	4,92		Memuaskan
24.	Buton	5,00	4,77	5,10		Memuaskan
25.	Kolaka Utara	4,98	4,87	4,94		Memuaskan
26.	Konawe Selatan	4,82	4,85	4,96		Memuaskan
27.	Konawe Utara	4,93	4,84	4,99		Memuaskan
28.	Kota Kendari	6,18	6,08	6,39		Memuaskan
29.	Muna	5,60	5,19	5,54		Memuaskan
30.	Wakatobi	5,04	5,18	5,18		Memuaskan

Sorong Selatan juga merupakan daerah dengan IPEI terendah di antara wilayah konservasi perairan pada tahun 2020 dan 2021 menggantikan Kabupaten Kaimana yang merupakan IPEI terendah pada tahun 2019. Kota Kendari merupakan wilayah dengan IPEI tertinggi sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Berdasarkan IPEI 2021 tidak terdapat wilayah dengan kategori “Unggul” dan hampir seluruh kabupaten/kota masuk kategori “Memuaskan” serta hanya terdapat 2 (dua)

kabupaten yang masuk kategori “Tidak Memuaskan” dengan skor IPEI < 4 (Kabupaten Raja Ampat dan Sorong Selatan). Daftar IPEI tahun 2019, 2020 dan 2021 disajikan pada Tabel 3. Data IPEI rata-rata nasional seluruh kabupaten/kota tahun 2021 diketahui sebesar 5,29.

Terdapat 12 kabupaten/kota yang berada di atas nilai rata-rata IPEI nasional 2021 dan 18 daerah lainnya masih di bawah rata-rata nasional (Gambar 1).



Gambar 1.

IPEI Tahun 2021 Kabupaten/Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi Perairan terhadap Rerata IPEI Nasional Tahun 2021 (Sumber: Bappenas, 2022, diolah)

Berdasarkan nilai pilar IPEI tahun 2021 diketahui Dimensi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi (Pilar 1) untuk seluruh Kabupaten/Kota masuk kategori “Memuaskan”, kecuali Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sorong Selatan yang masuk kategori “Kurang Memuaskan”. Capaian Dimensi Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan (Pilar 2) untuk seluruh Kabupaten/Kota masuk dalam kategori “Memuaskan”. Capaian Perluasan Akses dan Kesempatan (Pilar 3) untuk seluruh Kabupaten/Kota masuk dalam kategori “Memuaskan”, kecuali Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Morotai, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan yang masuk kategori “Tidak

Memuaskan”. Hal ini berarti keempat kabupaten/kota tersebut masih memiliki kendala pada infrastruktur dasar, kapabilitas manusia dan keuangan inklusif. Daftar Indeks Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3 disajikan pada Tabel 4.

Secara umum (Amalina, Hutagaol, & Asmara, 2013) menemukan bahwa pertumbuhan inklusif di bagian timur Indonesia belum terjadi hingga tahun 2013. Diaurrochmah dan Mulyanto (2021) menemukan pertumbuhan inklusif pada periode 2017-2019 seluruh provinsi belum ada yang mencapai kategori “Memuaskan”, dimana bagian timur Indonesia memiliki indeks pertumbuhan inklusif relatif lebih rendah dibanding bagian barat Indonesia.

Tabel 4.

Indeks Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3 Kabupaten/Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021

No	Kota/Kabupaten	PILAR (2021)					
		P1	Kategori	P2	Kategori	P3	Kategori
1.	Bone Bolango	4,81	Memuaskan	5,81	Memuaskan	4,20	Memuaskan
2.	Gorontalo	4,76	Memuaskan	5,83	Memuaskan	6,66	Memuaskan
3.	Kota Gorontalo	5,76	Memuaskan	5,99	Memuaskan	6,97	Memuaskan
4.	Pahuwoto	4,76	Memuaskan	5,93	Memuaskan	6,21	Memuaskan
5.	Kepulauan Aru	4,07	Memuaskan	5,63	Memuaskan	3,75	Tidak Memuaskan
6.	Maluku Tengah	4,90	Memuaskan	6,37	Memuaskan	6,10	Memuaskan
7.	Maluku Tenggara	4,75	Memuaskan	6,12	Memuaskan	6,57	Memuaskan
8.	Seram Bagian Barat	4,58	Memuaskan	5,90	Memuaskan	4,04	Memuaskan
9.	Morotai	4,42	Memuaskan	5,99	Memuaskan	3,92	Tidak Memuaskan
10.	Alor	4,47	Memuaskan	6,10	Memuaskan	6,10	Memuaskan
11.	Kota Kupang	5,40	Memuaskan	6,47	Memuaskan	6,71	Memuaskan
12.	Kupang	4,15	Memuaskan	5,83	Memuaskan	4,90	Memuaskan
13.	Lembata	4,47	Memuaskan	5,81	Memuaskan	5,04	Memuaskan
14.	Rote Ndao	4,44	Memuaskan	5,60	Memuaskan	5,05	Memuaskan
15.	Sabu Raijua	3,87	Tidak Memuaskan	6,02	Memuaskan	4,90	Memuaskan
16.	Biak Numfor	4,76	Memuaskan	5,59	Memuaskan	6,47	Memuaskan
17.	Kaimana	4,19	Memuaskan	5,63	Memuaskan	4,33	Memuaskan
18.	Raja Ampat	4,07	Memuaskan	5,51	Memuaskan	3,98	Tidak Memuaskan
19.	Sorong Selatan	3,76	Tidak Memuaskan	5,32	Memuaskan	3,67	Tidak Memuaskan
20.	Teluk Bintuni	5,03	Memuaskan	5,59	Memuaskan	6,01	Memuaskan
21.	Pangkajene dan Kepulauan	5,29	Memuaskan	6,50	Memuaskan	6,47	Memuaskan
22.	Banggai	5,06	Memuaskan	6,57	Memuaskan	6,49	Memuaskan
23.	Banggai Kepulauan	4,50	Memuaskan	6,59	Memuaskan	4,39	Memuaskan
24.	Buton	4,67	Memuaskan	6,34	Memuaskan	4,90	Memuaskan
25.	Kolaka Utara	4,96	Memuaskan	5,90	Memuaskan	6,73	Memuaskan
26.	Konawe Selatan	4,63	Memuaskan	6,06	Memuaskan	4,66	Memuaskan
27.	Konawe Utara	4,74	Memuaskan	7,00	Memuaskan	5,02	Memuaskan
28.	Kota Kendari	5,72	Memuaskan	6,73	Memuaskan	7,55	Memuaskan
29.	Muna	4,71	Memuaskan	6,37	Memuaskan	6,67	Memuaskan
30.	Wakatobi	4,70	Memuaskan	6,63	Memuaskan	4,93	Memuaskan

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

Keterangan:

P1: Pilar 1 (Dimensi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi)

P2: Pilar 2 (Dimensi Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan)

P3: Pilar 3 (Dimensi Perluasan Akses dan Kesempatan)

Secara teoritis peningkatan IPEI berarti menurunkan angka kemiskinan sehingga dapat mengurangi tekanan pada kawasan konservasi perairan (Bille, Lapeyre, & Pirard, 2012). Fan, *et al.* (2022) menemukan bahwa konservasi sumber daya alam di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi membutuhkan kompensasi ekologi agar tujuan konservasi tercapai. Bentuk kebijakan publik untuk kompensasi yang dapat diambil pemerintah diantaranya adalah program pemerintah berupa pemberian bantuan pemerintah dan pembangunan infrastruktur

pada kabupaten/kota yang beririsan dengan kawasan konservasi perairan. Kusumaningrum dan Yuhan (2019) menemukan bahwa rasio kredit UMKM terhadap PDRB, peningkatan nilai ekspor dan infrastruktur yang termasuk Pembentukan Modal Tetap Bruto secara signifikan berkorelasi positif dengan IPEI. Ketiga nilai tersebut dapat diintervensi oleh pemerintah melalui program berupa pemberian bantuan pemerintah dan pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan program pemerintah tersebut pada kabupaten/kota dapat dilakukan dengan skala prioritas melalui kriteria:

1. Semakin kecil nilai IPEI kabupaten/kota maka semakin tinggi prioritas memperoleh bantuan pemerintah; dan
2. Semakin kecil nilai indeks pilar kabupaten/kota maka semakin tinggi prioritas memperoleh bantuan pemerintah.

Berdasarkan 2 (dua) kriteria di atas maka daerah yang menjadi 5 (lima) prioritas pertama program pemerintah adalah Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Fokus program pemerintah pada wilayah tersebut adalah peningkatan Dimensi Akses dan Kesempatan (P3), kecuali pada Kabupaten Kaimana yang fokus pada peningkatan Dimensi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi (P1). Program pemerintah yang fokus pada P1 dapat berupa

bantuan pemerintah dengan *outcome* peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan jalan, peningkatan akses pendidikan menengah atas, peningkatan akses elektrifikasi, peningkatan infrastruktur telepon seluler, peningkatan akses fasilitas kredit perbankan dan kesempatan kerja. Program pemerintah pada P3 dapat berupa bantuan pemerintah dengan *outcome* peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, peningkatan akses modal usaha, peningkatan akses jaminan kesehatan dan penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, fasilitas tempat buang air). Perkembangan teknologi telekomunikasi berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun perkembangan infrastruktur telekomunikasi harus diikuti dengan pengembangan fasilitas elektrifikasi, transportasi dan air bersih sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud (Myovella, Karacuka, dan Haucap, 2019). Daftar prioritas pelaksanaan program pemerintah pada kabupaten/kota yang beririsan dengan kawasan konservasi perairan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.
 Prioritas Bantuan Pemerintah pada Kabupaten/Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi Perairan

Kota/Kabupaten	PILAR (2021)				Prioritas Urutan	Prioritas Dimensi
	2021	P1	P2	P3		
Sorong Selatan	3,67	3,76	5,32	3,67	1	P3
Raja Ampat	3,98	4,07	5,51	3,98	2	P3
Kepulauan Aru	4,32	4,07	5,63	3,75	3	P3
Kaimana	4,33	4,19	5,63	4,33	4	P1
Seram Bagian Barat	4,53	4,58	5,90	4,04	5	P3
Sabu Raijua	4,59	3,87	6,02	4,90	6	P1
Morotai	4,63	4,42	5,99	3,92	7	P3
Kota Kupang	4,71	5,40	6,47	6,71	8	P1
Rote Ndao	4,86	4,44	5,60	5,05	9	P1
Bone Bolango	4,88	4,81	5,81	4,20	10	P3
Lembata	4,91	4,47	5,81	5,04	11	P1
Banggai Kepulauan	4,92	4,50	6,59	4,39	12	P3
Kolaka Utara	4,94	4,96	5,90	6,73	13	P1
Konawe Selatan	4,96	4,63	6,06	4,66	14	P1
Konawe Utara	4,99	4,74	7,00	5,02	15	P1
Buton	5,10	4,67	6,34	4,90	16	P1
Wakatobi	5,18	4,70	6,63	4,93	17	P1

Kota/Kabupaten	PILAR (2021)				Prioritas Urutan	Prioritas Dimensi
	2021	P1	P2	P3		
Alor	5,22	4,47	6,10	6,10	18	P1
Biak Numfor	5,35	4,76	5,59	6,47	19	P1
Pahuwoto	5,38	4,76	5,93	6,21	20	P1
Gorontalo	5,45	4,76	5,83	6,66	21	P1
Maluku Tenggara	5,49	4,75	6,12	6,57	22	P1
Maluku Tengah	5,52	4,90	6,37	6,10	23	P1
Muna	5,54	4,71	6,37	6,67	24	P1
Banggai	5,75	5,06	6,57	6,49	25	P1
Pangkajene Dan Kepulauan	5,86	5,29	6,50	6,47	26	P1
Kupang	5,96	4,15	5,83	4,90	27	P1
Teluk Bintuni	6,01	5,03	5,59	6,01	28	P1
Kota Gorontalo	6,10	5,76	5,99	6,97	29	P1
Kota Kendari	6,39	5,72	6,73	7,55	30	P1

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

SIMPULAN

Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada 30 kabupaten/kota yang beririsan dengan kawasan konservasi perairan menunjukkan 1 (satu) daerah yang mengalami tren menurun pada periode 2019-2021 yaitu Kabupaten Sorong Selatan, 25 daerah yang mengalami tren menurun pada periode 2019-2020 dan 4 kabupaten/kota yang konsisten mengalami kenaikan pada periode 2019-2021. Posisi relatif IPEI 18 daerah menunjukkan masih berada di bawah rata-rata nasional. Raja Ampat dan Sorong Selatan merupakan daerah yang masuk kategori “Tidak Memuaskan” berdasarkan IPEI 2021.

Analisis IPEI 2021 dan indeks Pilar penyusunnya menghasilkan daftar daerah untuk prioritas pelaksanaan program pemerintah. Dari 30 daftar kabupaten/kota yang beririsan dengan kawasan konservasi perairan maka prioritas 5 (lima) daerah pertama adalah Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Prioritas intervensi dilakukan pada Dimensi Akses dan Kesempatan, kecuali pada Kabupaten Kaimana yang memiliki prioritas Dimensi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi untuk diintervensi.

SANWACANA

Terima kasih diucapkan kepada Direktorat Jasa Kelautan atas saran masukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, D. H., Hutagaol, M., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 85-112.
- Bappenas. (2019). *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Retrieved from Inklusif Bappenas: <http://inklusif.bappenas.go.id/indeks#pembangunanEkonomi>
- Bappenas. (2022, Agustus 1). *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Retrieved from Inklusif Bappenas: <http://inklusif.bappenas.go.id/data>
- Bille, R., Lapeyre, R., & Pirard, R. (2012). Biodiversity conservation and poverty alleviation: a way out of the deadlock? *Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society*, P1-P15.

- CBD. (2007, 2 7). Retrieved from <https://www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml>
- Diaurrochmah, F., & Mulyanto. (2021). Analisis Indeks Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia. *Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 178-195.
- Fan, L., Feng, C., Wang, Z., Tian, J., Huang, W., & Wang, W. (2022). Balancing the Conservation and Poverty Eradication: Differences in the Spatial Distribution Characteristics of Protected Areas between Poor and Non-Poor Counties in China. *Sustainability*, 1-14.
- Jacobs, M., & Mazzucato, M. (2016). *Rethinking Capitalism : Economics and Policy for Sustainable and*. West Sussex: The Political Quarterly Publishing Co. Ltd.
- KKP. (2021). *SatuPeta KKP*. Retrieved from SatuPeta KKP: <https://satupeta.kkp.go.id/gis/apps/webappviewer/index.html?id=61efef204e6a4cbc858aa320494e12d9>
- KKP. (2022, July 1). *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/kkp/artikel/41874-kkp-optimis-penuhi-32-5-juta-ha-kawasan-konservasi-perairan-di-2030>
- Kraft, M., & Furlong, S. (2018). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*. California: Sage CQ Press.
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1-17.
- McKinley, T. (2010). *Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive*. Manila: Asian Development Bank
- Myovella, G., Karacuka, M., & Haucap, J. (2019). Digitalization and economic growth: A comparative analysis of Sub-Saharan Africa and OECD economies. *Telecommunications Policy*, 1-12.
- Rauniyar, G., & Kanbur, R. (2010). *INCLUSIVE DEVELOPMENT: Two Papers on Conceptualization, Application, and the ADB Perspective*. New York: AgEcon Search.
- Shiferaw, B., & Bantilan, C. (2004). Agriculture, rural poverty, and natural resource management in less favored. *Food, Agriculture & Environment*, 328-339.
- Stiglitz, J., & Rosengard, J. (2015). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W.Norton & Company, Inc.
- Sucha, V., & Sienkiewicz, M. (2020). *Science for Policy Handbook*. Oxford: Elsevier.
- Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zaionol, L., Ramli, R., & Amin, L. Biopiracy and states sovereignty over their biological resources. *African Journal of Biotechnology* Vol. 10(58), 12395-12408